

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini konflik atau pertentangan semakin banyak terjadi. Berbagai unsur elemen masyarakat termasuk unsur penguasa menjadi biang kerok timbulnya konflik. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya dan lemahnya seseorang atau sekelompok orang. Setiap elemen baik dari masyarakat maupun pihak-pihak pembuat kebijakan yang menyumbang terjadinya konflik di masyarakat mungkin tidak menyadari bahaya yang mengancam disintegrasi sosial ini akan berdampak pada keutuhan negara. C. Wright Mills, pencetus teori konflik modern menyatakan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan sumber daya. Dalam pandangan Mills, struktur sosial diciptakan melalui konflik antara masyarakat yang berbeda kepentingan dan sumber daya.<sup>1</sup>

Yang mengherankan, posisi pemerintah saat ini yang tidak ajeg kerap menjadi pemicu utama timbulnya konflik di masyarakat. Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan negeri ini kerap menimbulkan pertentangan yang bersifat terbuka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C. Wright Mills (Eds), 1947, From Max Weber : Essay In Sociology, London : Lowe&Brydone Printers. Ltd.

<sup>2</sup> Soekanto, Soejono.2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Grafindo Persada

Dari sisi masyarakat, konflik terjadi kebanyakan akibat dari persaingan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau. Pertarungan mencari penghidupan yang lebih baik dan pemenuhan hajat hidup menyulut timbulnya konflik antara masyarakat yang termarginalkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat kenyamanan yang baik, baik itu diperoleh karena hasil usahanya maupun karena adanya perlindungan pemerintah terhadap kelangsungan usaha dan kesejahteraan. Kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya, serta kehadiran penguasa yang dianggap berat sebelah menimbulkan konflik yang lebih luas. Sumbangan pemerintah dalam menciptakan konflik, dapat berawal dari kebijakan dan tindak-tanduk pemerintah yang alih-alih pro rakyat dan berkeadilan, malah disinyalir menguntungkan segelintir manusia yang belum tentu juga bagian dari warga negara Indonesia yang baik. Pelanggar aturan mendapat perlindungan yang jelas, sementara warga negaranya yang taat aturan malah terombang-ambing dalam ketidakpastian jaminan hukum. Termasuk issue minoritas dan mayoritas yang tidak dapat ditengahi oleh pemerintah dengan baik, serta pemerataan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak masyarakat yang belum mendapatkan porsi sesuai keharusannya. Salah satunya yakni adanya konflik antara pedagang sebagai rakyat kecil versus pemerintah selaku penguasa dan pembuat kebijakan.

Konflik sosial biasanya terjadi karena adanya satu pihak atau kelompok yang merasa kepentingan atau haknya dirampas dan diambil oleh pihak atau kelompok lain dengan cara-cara yang tidak adil. Yang oleh Karl Marx dikenal

dengan *surplus value*.<sup>3</sup> Dan konflik ini dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal.

Konflik horizontal terjadi antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, yang dibedakan oleh agama, suku, bangsa dan lain-lain. Sedangkan konflik vertikal biasanya terjadi antara suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau lapisan bawah dengan lapisan atas atau penguasa. Masalah Pedagang pasar selama ini tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pedagang pasar seringkali menjadi target utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti pengusuran dan relokasi.

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang pasar yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang mengharuskan mereka siap di relokasi. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas.

---

<sup>3</sup> Susetian, 2000, *Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Di sisi lain, nasib pasar tradisional yang menjadi saluran distribusi utama hasil pertanian rakyat Indonesia, saat ini berada di ujung tanduk karena tak mampu bersaing dengan pasar modern. Padahal tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada pasar tradisional. Ketika dilanda krisis ekonomi, pasar tradisional mampu menjadi penopang hidup sebagian masyarakat Indonesia, baik yang berprofesi sebagai pedagang, maupun para petani yang hanya mampu memasarkan hasil pertaniannya lewat pasar rakyat ini. Dengan semakin tergerusnya pasar tradisional berimbas pada para pemasok lokal yang pada umumnya tidak bisa masuk ke pengecer besar. Pertumbuhan pasar modern terbukti membahayakan posisi pasar tradisional dan ritel-ritel tradisional lain di sekitarnya. Sebagai akibat kebijakan Pemda yang mengizinkan pembangunan banyak pasar modern. Hal seperti itu kemudian menimbulkan pro dan kontra terutama pada masyarakat pada umumnya dan pada pedagang itu sendiri pada khususnya. Pemerintah diuntut membuat kebijakan yang pro terhadap pedagang pasar di luar kepentingan - kepentingan pengusaha atau pengembang (stake holder). Supaya tidak menimbulkan kerancuan atau konflik dan juga adanya perlawanan dari masyarakat agar kebijakan pemerintah pro akan kelangsungan hidup pedagang. Perlawanan masyarakat sipil (civil society) terhadap negara khususnya di aras lokal bermula dari adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil atau pedagang pasar. Ini dibuktikan dari tumbuhnya pasar - pasar moderan di kota Malang yang berkembang dan menggeser keberadaan pasar tradisional seperti pasar Dinoyo contohnya harus direlokasi karena kebijakan pemerintah daerah kota Malang pada saat itu menyetujui pembangunan pasar moderan atau mal Dinoyo City di

tempat tersebut hal ini mengharuskan pedagang pasar dinoyo yang semula menempati daerah tersebut harus pindah ke kelurahan Merjosari atau pasar penampungan sementra merjosari. Nyaris sebulan terakhir masyarakat Kota Malang disuguhi polemik penggusuran pasar tradisional merjosari (selanjutnya disebut pasar merjosari). Pemerintah Kota Malang meminta para pedagang merjosari untuk segera pindah dan menempati pasar terpadu dinoyo (selanjutnya disebut dengan pasar dinoyo). Satuan Polisi Pamong Praja dari Dinas Pasar, Polisi, hingga TNI turut serta mengawal proses relokasi ini.

Alasan pemerintah untuk merelokasi pun sangat kuat, yaitu lahan yang digunakan oleh Pasar Merjosari sejatinya merupakan RTH (ruang terbuka hijau). Sehingga keberadaan pasar di lahan tersebut bertentangan dengan peraturan daerah kota malang tentang rencana tata ruang wilayah. Dengan memperhatikan landasan yang dimiliki oleh pemerintah, maka sudah jelas tidak ada alasan bagi pedagang untuk bersikukuh berjualan di pasar merjosari. Selain keberadaannya melanggar ketentuan tentang tata ruang wilayah kota, telah tersedia tempat relokasi di pasar dinoyo. Akan tetapi selayaknya pepatah tiada asap tanpa api, penolakan ini nampaknya bukan sekedar persoalan penertiban atas sebuah pelanggaran semata. Karena para pedagang pasar merjosari pun sebelumnya merupakan para pedagang pasar dinoyo yang pada tahun 2012-2013 direlokasi oleh pemerintah Kota Malang. Pada saat itu, Relokasi dilandaskan pada program pemerintah kota untuk melakukan revitalisasi pasar di Kota Malang. Berdasarkan keputusan walikota malang, lokasi relokasi ini pada awalnya bernama pasar penampungan merjosari, akan tetapi pada tahun 2013 berubah menjadi pasar tradisional merjosari. Perubahan nama ini menghapuskan kata

penampungan pada nama pertama dan mengesankan bahwa Pasar Merjosari merupakan pasar yang tetap dan tidak akan direlokasi kembali. Artinya, kegiatan jual beli pada pasar merjosari di atas lahan yang diperuntukan bagi ruang terbuka hijau bukan semata-mata kesalahan para pedagang. Justru pemerintah Kota Malang yang telah melanggar aturan tersebut, kemudian melibatkan warga pedagang di dalamnya, dan kini meminta pedagang menanggung seluruh kesalahan tersebut dengan melakukan penggusuran.

Pasar Dinoyo yang merupakan pasar tradisional hendak digusur diganti dengan Mall Dinoyo. Dalihnya adalah penertiban dan pembersihan sebagaimana sering dipakai sebagai dalih Pemkot kapitalistis lainnya. Namun pedagang pasar Dinoyo berjuang melawan dan mempertahankan ruang hidupnya. Sampai kemudian mereka dijanjikan diberikan pasar tradisional di samping Mal Dinoyo tersebut. Sementara itu mereka diberikan ruang penampungan sementara di Merjosari. Namun setelah pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo selesai hasilnya ternyata tidak sesuai kesepakatan. Ukuran bedak dan kios tidak sesuai dengan kartu bedak yang dikeluarkan Pemkot Malang lewat Dinas Pasar. Kemudian tempat berdagang di Pasar Dinoyo tidak layak dan fasilitas yang tersedia tidak memadai. Berikutnya banyak kesepakatan yang dibuat oleh Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo (Kopasdin) yang mengatasmakan pedagang Pasar Dinoyo tapi tidak sesuai aspirasi dan keinginan pedagang Pasar Dinoyo. Dengan kata lain tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor Pemerintah Kota Malang: 050/558/35.72.112/2010 dan Nomor PT Citra Gading Asritama: 352/CGA.SBY/IX/2010 yang disepakati dulu. Bahkan ini diperkuat dengan hasil uji kelayakan oleh DPRD Kota Malang yang juga mengonfirmasikan bangunan

pasar Dinoyo yang baru masih belum layak ditempati. Oleh karena itu para Pedagang Pasar Merjosari menolak pindah dari Penampungan Sementara di Merjosari ke Pasar Terpadu Dinoyo sampai hak-haknya dipenuhi sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Namun Pemkot Malang malah menunjukkan keberpihakannya ke kapitalis pertokoan, dalam hal ini PT Citra Gading Asmara (CGA). Mohammad Anton, Walikota Malang, memerintahkan penutupan Pasar Penampungan Sementara di Merjosari lewat tindakan mencabut Keputusan Walikota Malang No. 188.45/204/35.73.112/2013 tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pasar Dinoyo di Kelurahan Merjosari sebagai Pasar Tradisional Merjosari. Massa aksi menyatakan tindakan Pemkot ini mengakibatkan kerawanan status para pedagang pasar. Satu sisi Pasar Terpadu Dinoyo yang dijanjikan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sisi lainnya keberadaan mereka di Pasar Tradisional Merjosari terancam digusur pula. Lebih parahnya, menyusul pencabutan Keputusan Walikota tersebut, pihak Pemkot mencoba melakukan pemasangan seng untuk menutup Pasar Merjosari. Namun upaya ini dilawan dan berhasil digagalkan para pedagang pasar. Berikutnya malah muncul isu upaya pemutusan sambungan listrik ke pasar Merjosari. Massa aksi menyimpulkan tindakan-tindakan sewenang-wenang demikian tidak hanya menunjukkan arogansi Pemkot Malang namun keberpihakan Pemkot yang lebih condong kepada para kapitalis daripada rakyat kecil. Oleh karena itu pada pagi Jumat (11/11/2016), ratusan pedagang pasar Merjosari berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintahan Kota (Pemkot) Malang. Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Pedagang Pasar Merjosari bersama organisasi-

organisasi massa dan mahasiswa mendatangi Balai Kota membawa dua tuntutan utama. *Pertama*, hentikan segala bentuk intimidasi yang dilakukan kepada para pedagang Pasar Merjosari. *Kedua*, tetapkan kembali status hukum Pasar Merjosari. Salah satu orator aksi menyampaikan, “Bung Karno dulu sudah mewanti-wanti. Bangsa ini harus anti kapitalisme. Mengapa Bung Karno punya pesan seperti ini? Sebab penjajahan berikutnya bukan penjajahan militer tapi penjajahan ekonomi. Buktinya bisa kita lihat sekarang bangsa sendiri tapi malah membela para penjajah,” kritik anggota komunitas seni budaya Sedulur Petruk ini. “Kamu pemimpin kapitalisme atau pemimpin rakyat?!” kecamnya kepada Pemkot Malang.

Besarnya massa aksi dan tajamnya orasi-orasi yang diserukan di atas mobil komando ini berhasil memaksa Walikota Malang dan para perwakilan DPRD Kota Malang untuk turun dan menemui para pedagang pasar Merjosari dan mahasiswa. Namun siang itu mereka hanya menyatakan akan menampung aspirasi dan melakukan rapat pembahasan untuk menindaklanjutinya. Salah satu pimpinan aksi menanggapi. “Kita tidak butuh bahasa diplomasi. Tapi bahasa yang pasti. Kalau kesepakatan belum ada maka kami akan tetap melakukan aksi,” ia memperingatkan. Orator dari pihak mahasiswa juga menyatakan, “Akan kita kawal terus isu dan tuntutan ini sampai terpenuhi. Bahkan kalau perlu, kita kerahkan massa lebih besar lagi.”

Pasar merjosari merupakan pasar penampungan sementara yang di bangun oleh pihak pemkot dan pengembang dengan dalih untuk merrvitalisasi pasar dinoyo. Dengan keputusan tersebut maka pihak pedagang menolak karna tidak ada keputusan yang jelas. Namun dengan adanya komunikasi dan mediasi



akhirnya pedagang dan Pemkot sepakat untuk menjadikan pasar sementara mejosari menjadi pasar tetap. Namun saat ini pedagang pasar mejosari di desak agar segera pindah ke pasar terpadu landungsari walau menuai pro dan kontra pedagang tidak punya pilihan lain untuk menyambung hidup mereka dan menopang perekonomian sedikit demi sedikit pedagang mulai pindah dan saat ini pasar yang lama sudah tidak beroperasi.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana analisa konflik yang terjadi antara masyarakat (pedagang pasar) sipil dengan penguasa (Pemkot) di Kota Malang ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menganalisa konflik masyarakat (pedagang pasar) sipil dengan penguasa (Pemkot) di Kota Malang

## **C. Tujuan penelitian**

1. Menganalisa konflik yang terjadi antara masyarakat (pedagang pasar) sipil dengan penguasa (Pemkot) di Kota Malang ?
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam menganalisa konflik yang terjadi antara masyarakat (pedagang pasar) sipil dengan penguasa (Pemkot) di Kota Malang ?

## **D. Manfaat penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan serta menambah referensi yang ada di perpustakaan lembaga guna menambah ilmu pengetahuan para peserta didik pada khususnya dan

aktivitas akademik pada umumnya dan juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis serta memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang dapat membantu Pemerintah Daerah khususnya dinas perindustrian dan perdagangan dalam penegakan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pedagang pasar di Kota Malang

### **1. Manfaat Teoritik**

Secara teoritik yaitu adalah untuk mengetahui peraturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur hal tersebut tidak dibarengi dengan mentalitas, kuantitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam menentukan keikan yang leih pro terhadap rakyat atu pedagang pasar.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam hal ini merupakan sebuah hasil dari tujuan penelitian ini sendiri. Manfaat ini menekankan pada praktek di lapangan secara langsung atau tidak langsung yakni memberi rekomendasi kinerja pada penyelenggaraan peraturan daerah atas keputusan atau perda mengenai pedagang pasar di pemerintahan kota Malang.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Analisis**

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu

menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

## **2. Konflik**

Konflik adalah suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun negara.

## **3. Masyarakat sipil**

Masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah Masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## **4. Penguasa**

Penguasa adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi pikiran serta tindakan orang lain sehingga bekerja sesuai dengan apa yang diinginkannya.

## **5. Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

## **F. Definisi oprasional**

1. Analisis konflik masarakat sipil melawan penguasa.
2. Kendala yang dihadapi dalam dalam menganalisa konflik masyarakat sipil dan penguasa.

## **G. Kerangka berfikir**

Pasar Dinoyo yang merupakan pasar tradisional hendak digusur diganti dengan Mal Dinoyo. Dalihnya adalah penertiban dan pembersihan sebagaimana sering dipakai sebagai dalih Pemkot kapitalistis lainnya. Namun pedagang pasar Dinoyo berjuang melawan dan mempertahankan ruang hidupnya. Sampai kemudian mereka dijanjikan diberikan pasar tradisional di samping Mal Dinoyo tersebut. Sementara itu mereka diberikan ruang penampungan sementara di Merjosari. Namun setelah pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo selesai hasilnya ternyata tidak sesuai kesepakatan. Ukuran bedak dan kios tidak sesuai dengan kartu bedak yang dikeluarkan Pemkot Malang lewat Dinas Pasar. Kemudian tempat berdagang di Pasar Dinoyo tidak layak dan fasilitas yang tersedia tidak memadai. Berikutnya banyak kesepakatan yang dibuat oleh Koperasi Pedagang Pasar Dinoyo (Kopasdin) yang mengatasnamakan pedagang Pasar Dinoyo tapi tidak sesuai aspirasi dan keinginan pedagang Pasar Dinoyo. Dengan kata lain tidak sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor Pemerintah Kota Malang: 050/558/35.72.112/2010 dan Nomor PT Citra Gading Asritama: 352/CGA.SBY/IX/2010 yang disepakati dulu. Bahkan ini diperkuat dengan hasil uji kelayakan oleh DPRD Kota Malang yang juga mengonfirmasikan bangunan pasar Dinoyo yang baru masih belum layak ditempati. Oleh karena itu para

Pedagang Pasar Merjosari menolak pindah dari Penampungan Sementara di Merjosari ke Pasar Terpadu Dinoyo sampai hak-haknya dipenuhi sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Namun Pemkot Malang malah menunjukkan keberpihakannya ke kapitalis pertokoan, dalam hal ini PT Citra Gading Asmara (CGA). Mohammad Anton, Walikota Malang, memerintahkan penutupan Pasar Penampungan Sementara di Merjosari lewat tindakan mencabut Keputusan Walikota Malang No. 188.45/204/35.73.112/2013 tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pasar Dinoyo di Kelurahan Merjosari sebagai Pasar Tradisional Merjosari. Massa aksi menyatakan tindakan Pemkot ini mengakibatkan kerawanan status para pedagang pasar. Satu sisi Pasar Terpadu Dinoyo yang dijanjikan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **H. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Terakait dengan judul penelitian Analisis Konflik Masyarakat sipil vs Penguasa (Studi kasus konflik pedagang dan pemerintah kota Malang terkait relokasi pedagang pasar dari pasar Merjosari ke pasar Dinoyo). Hal ini karena hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya melalui deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu proses peristiwa dalam situasi yang alami.

## **2. Sumber Data**

Diperoleh melalui penelitian adalah data yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena itu, data-data yang ada haruslah berasal dari sumbernya. Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama secara langsung dari objeknya dan diolah oleh suatu organisasi dan perorangan atau dapat dikatakan data primer merupakan pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perusahaan dan pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya. Data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan resmi yang dibuat oleh sumber yang berwenang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, peasaan. Tetapi tidak semua hal tersebut perlu diamati oleh peneliti hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Observasi merupakan suatu

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan alat pengecek atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face relationship) antara pencari informasi (interviewer atau informan) dengan sumber informasi (interviewee).

#### **c. Dokumentasi**

Metode dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental

dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **4. Subjek Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti akan amati. Kesimpulan dari kedua pengertian diatas Subjek peneliti adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Maka dari yang menjadi subjek penelitian adalah Pemkot kota Malang, Kepala dinas perindustrian dan perdagangan, pedagang pasar Merjosari.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Malang. Peneliti juga melakukan penelitian langsung ke sumber data, dengan maksud agar proses dalam pencarian data untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu dan akurat, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan apa yang sudah peneliti lakukan.



## **6. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan, antara lain:

### **a. Reduksi Data**

Dalam reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan dalam rangka untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga nantinya kesimpulan dapat ditarik secara tepat dan diverifikasikan.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data dimana ini berarti sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan tertentu. Penyajian data kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, naskah atau teks, grafik, jaringan dan bagan, sehingga kemudian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan kemudian dapat menentukan apakah menarik kesimpulan sudah benar ataukah harus terus melakukan analisis demi mendapatkan kesimpulan yang valid.

### **c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi**

Menarik suatu kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti melalui data-data yang terkumpul dan kemudian kesimpulan tersebut dan diverifikasi atau diuji kebenarannya dan validasinya.

## **I. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peer debriefing atau membicarakan dengan orang lain adalah mendiskusikan hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan berdiskusi dengan dosen, peneliti lain yang meneliti tentang topik yang sama untuk mendapatkan kebenaran yang sesuai. Teknik selanjutnya adalah persistence atau observasi terus-menerus yang dilakukan peneliti, untuk lebih mendalami permasalahan yang dibahas.